

**ANALISIS PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA BAUBAU**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh

**IVAN PAHLEVI
E 12109262**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahilahi Rabbil'alam

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sedalam–dalamnya atas segala nikmat karunia Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau".

Dalam menyelesaikan penulisan ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang memerlukan. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada pihak lain, maka secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayahanda H. Sudir Said dan Ibunda Hj.Farida atas segala doa yang dipanjatkan dan segala cinta dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis serta perjuangan yang telah mereka lakukan sehingga membawa penulis menuju salah satu jalan untuk mencapai kesuksesan hidupnya, terima kasih pula kepada sodara-sodariku Rizky Amalia, Almarhum Fandy Gunawan, Ayu Rahayu, dan Ricky Faldi atas segala dukungan yang diberikan dan juga pelajaran hidup akan kebersamaan

dan rasa saling mencintai dan menyayangi sesama rahim. Terima kasih pula kepada Ayyun Saima Havid yang telah hadir dalam perjalanan hidup penulis, yang dengan keikhlasannya mau terlibat dan mendorong semangat penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini juga, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan diwaktu yang tepat, semoga Allah SWT memberikan balasannya. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Pimpinan baru di Universitas Hasanuddin yang insya allah akan memberikan warna baru bagi kemajuan Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. H.A. Gau Kadir, MA dan A. Murfhi, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan terhadap penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen penguji yang memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen FISIP UNHAS yang telah berjasa yang tak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesabaran, keikhlasan, dan juga niat baiknya yang telah menyampaikan ilmunya kepada penulis.

5. Seluruh Staf yang berada dalam Inspektorat Kota Baubau, serta para informan yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya dalam membantu penyelesaian penelitian saya.
6. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan saya motivasi dalam hidup dan mengenal kehidupan.
7. Sodara-Sodariku dalam dalam bingkai nama AUFKLARUNG (Rahmat, Bebz, Rifad, Syahyadi, Cuna, Ander, Erbon, Winda, Imra, Arni, Diah, Anha, Aina, Josh, Helni, Musdalifah, Adhe, Dipo, Anto, Jaya, Suhardiansyah, Banjir, Arhy, Ilyas, Suriadi, Satria, Ewink, Fuad, Ardy, Aidil, Chandra, Jani, Muftarikul, Ardiansyah) yang telah memberikan sebuah kisah tak ternilai dalam hidupku dan juga insya allah akan memberikan pencerahan dalam pencapaian kesuksesanku nantinya. Kita tetap “satu tekad satukan gerakan”
8. Rumah Jingga HIMAPEM (Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan) sebuah rumah kecil yang tak ternilai dan memiliki para pemuda-pemudi yang “aneh”, jenius, berkarakter, berjiwa sosial yang tinggi, dan luar biasa. Untuk Kanda Revolusioner (05), Respublika (06), Renaissance (07), Glastnost (08) dan juga Adinda Volksgeist (10), Enlightenment (11), Fraternity (12), serta Lebensraum (13). Semoga kita tetap berjaya. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita.

9. Teman-teman KKN Gelombang 82 Desa Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang juga pernah memberikan sumbangsi dalam pencapaian sarjanaku.
10. Teman-teman Sekolahku mulai TK hingga SMA, serta
11. Kepada semua orang yang telah berjasa dalam hidupku.

Terakhir penulis menyadari, bahwa tidak satupun manusia yang sempurna di dunia ini. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Dengan demikian segala keterbatasan yang penulis miliki sebagai manusia, penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat atau setidaknya menjadi bahan masukan untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Aaamiiin Ya Rabb

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Makassar, 30 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar li	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Lampiran	x
Intisari	xi
Abstract	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Balakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengawasan	8
2.1.1. Pengertian Pengawasan	8
2.1.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan	11
2.1.3. Macam-macam Teknik Pengawasan	15
2.1.4. Fungsi-fungsi Pengawasan	20
2.1.5. Tindak Lanjut Pengawasan	21
2.1.6. Pentingnya Pengawasan	22
2.1.7. Tahapan-tahapan Pengawasan	25
2.1.8. Pengawasan yang Efektif	26

2.2. Konsep Inspektorat	27
2.3. Kerangka Konseptual	30

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian	31
3.2. Tipe Penelitian	31
3.3. Sumber Data	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Informan Penelitian	32
3.6. Analisis Data	33
3.7. Definisi Konsep	33

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1. Sejarah Singkat	36
4.1.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah	40
4.1.3. Topografi dan Hidrologi	42
4.1.4. Penduduk dan Tenaga Kerja	43
4.1.5. Sosial dan Umum	46
4.1.6. Kondisi Monografi	48
4.1.7. Pemerintahan	54
4.1.8. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Baubau	56
4.2. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Baubau	64
4.2.1. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kota Baubau	65
4.2.2. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Baubau	68

4.2.3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan	77
4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau	81
4.3.1. Faktor Internal	81
4.3.2. Faktor Eksternal	83

BAB V KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan	85
5.1.1. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Baubau	85
5.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau	86
5.2. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	89
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Tabel 4.1**

Luas Kota Baubau menurut Kecamatan	41
--	----

Tabel 4.2

Jumah Penduduk Kota Baubau Menurut Kecamatan Tahun 2010	44
--	----

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Baubau Tahun 2013	82
---	----

DAFTAR GAMBAR**Gambar 2.1**

Kerangka Konseptual	30
---------------------------	----

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kota Baubau	42
--------------------------------	----

Gambar 4.2

Pilar PoMaMaSIKA	62
------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2

Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bau-Bau

Lampiran 3

Peraturan Walikota Bau-Bau Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau

INTISARI

Ivan Pahlevi, E12109262. Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau, *(Dibimbing oleh Dr.H.A.Gau Kadir,MA dan A.Murfhi, S.Sos,M.Si).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : *Pertama*, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. *Kedua*, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. *Ketiga*, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan Inspektorat

ABSTRACT

Ivan Pahlevi, E12109262. Analysis Function Implementation Supervision Inspectorate in Local Government Administration in Baubau City, (Supervised by Dr.HAGau Kadir, MA and A.Murfhi, S. Sos, M.Si).

This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumpulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative.

The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.

Keywords: Function Monitoring Inspectorate

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Paradigma penyelenggaran pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi pola yang terdesentralisasi membawa konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggung jawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya melalui fungsi-fungsi organik manajemen pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi merupakan

sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Pemerintahan daerah pada hakekatnya adalah sub-sistem dari pemerintahan nasional dan secara implisit, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Agar maksud penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka pengawasan sebagai instrument dalam manajemen organisasi pemerintahan harus berjalan dan terlaksana secara optimal.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Inspektorat Kota Baubau sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 yang kemudian dipertegas didalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau.

Urgensi lembaga pengawasan di daerah sangat dibutuhkan, bukan hanya karena luasnya kewenangan yang dimiliki, namun juga praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak selalu mulus. Dengan demikian, pengawasan pada umumnya dan pengawasan fungsional pemerintah pada khususnya, memegang peranan penting dalam pencapaian pemerintahan yang baik..

Pengawasan diperlukan untuk koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan sebagai media kontrol terhadap Pemerintah Daerah yang bermakna, sebagai usaha preventif atau

perbaikan bilamana terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Di samping itu, juga sebagai tindakan represif, hal mana dasar-dasarnya diatur dalam konstitusi dan penjabarannya diatur dalam undang-undang. Peran pengawasan fungsional pemerintah yang cenderung belum efisien, dan efektif menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. (Manullang.2006, hal. 13)

Pelaksanaan tugas pokok suatu organisasi, tidak akan tercapai dengan baik jika faktor pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan yang kurang baik akan berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah akan diterapkan petunjuk yang akan dilakukan guna menunjang efektivitas perencanaan pengawasan. (Victor.1994, hal. 39)

Fungsi pengawasan pemerintahan daerah memiliki kewenangan berjenjang dan terintegrasi dalam mekanisme pengawasan dan pemeriksaan, sedangkan sasaran pengawasan adalah ditemukannya penyimpangan atas rencana atau target. Tindakan yang dilakukan antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, menyarankan agar ditekan adanya pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran sesuai dengan rencana, menilai kinerja aparat pemerintah, sebagai institusi pelatihan dan *clearing house* serta pemberian masukan kepada *Top Management* (pimpinan) tentang kondisi dan solusi distorsi birokrasi.

Fenomena belum efisien dan efektifnya peranan pengawasan fungsional pemerintah tidak hanya bersifat umum, namun juga bersifat khusus di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dirasakan kebutuhan akan pentingnya suatu bentuk koordinasi yang tepat, dan komitmen yang tinggi dalam upaya efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau”**

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian yang telah digambarkan dalam latar belakang maka permasalahan yang menjadi fokus pertanyaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi instansi terkait dan masyarakat yang utamanya adalah bagaimana lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan:

- a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Manfaat bagi instansi terkait dan masyarakat:

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pikiran bagi pihak pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan yang dilakukan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Inspektorat Kota Baubau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pengawasan

2.1.1. Pengertian Pengawasan

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan di lingkungan pemerintahan menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan.

Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results. (Schermerhorn,2002).

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . *the process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner,Freeman,&Gilbert,1995)

Menurut Winardi (2000, hal. 585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. 216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan".

Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994, hal. 104) "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Unk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mendefinisikan bahwa : " Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ".

Iman dan Siswandi (2009 : 195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara

membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Reksohadiprodjo (2008 : 63) mengemukakan bahwa : "Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana."

Terry dan Leslie (2010 : 232) berpendapat bahwa : "Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius."

Sarwoto (2010 : 94) menyatakan bahwa : " Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Fathoni (2006 : 30) mendefinisikan bahwa : " Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan ".

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi

manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum.

2.1.2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004:337) mengemukakan:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

3. Membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.
3. Agar adanya keluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Menurut Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.

3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 1995 : 36) adalah : Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.1.3. Macam-macam Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Hutaauruk, 1986 : 298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang

tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".

2. Pengawasan preventif dan represif

- a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

- b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

- a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, dalam Siagian (2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- a. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a)

inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

- b. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

- a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing

organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

2.1.4. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan sendiri adalah :

- 1) Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 2) Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- 3) Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- 4) Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemboosan-pemborosan.

2.1.5. Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :

1. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
2. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :
 - a. Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.
 - b. Tuntutan perbendaharaan
 - c. Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
3. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat

indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.

4. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

2.1.6. Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah :

- a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- c. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat

kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2.1.7. Tahapan-tahapan Pengawasan

1. Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

Bentuk standar yang umum yaitu :

- a. Standar Fisik
- b. Standar Moneter
- c. Standar Waktu

2. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

3. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel.

4. Tahap Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.

5. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

2.1.8. Pengawasan yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu :

1. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
2. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
3. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
4. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
5. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
6. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
8. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
9. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil
10. Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranan otonomi, tanggung jawab dan prestasi

2.2. Konsep Inspektorat

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan :

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai petaturan perundang-undangan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Inspektorat Kota Baubau sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawasi jalannya pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 yang kemudian dipertegas didalam

Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau.

Inspektorat mempunyai tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Adapun fungsi inspektorat daerah yaitu :

- a. Perencanaan program pengawasan ;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan ;
- c. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan atas petunjuk Walikota ;
- d. Pelaksanaan administrasi inspektorat ;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan ;
- f. Pengelolaan barang milik / kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya ;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Walikota ;
- i. Penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, sasaran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Walikota ;

Struktur Organisasi

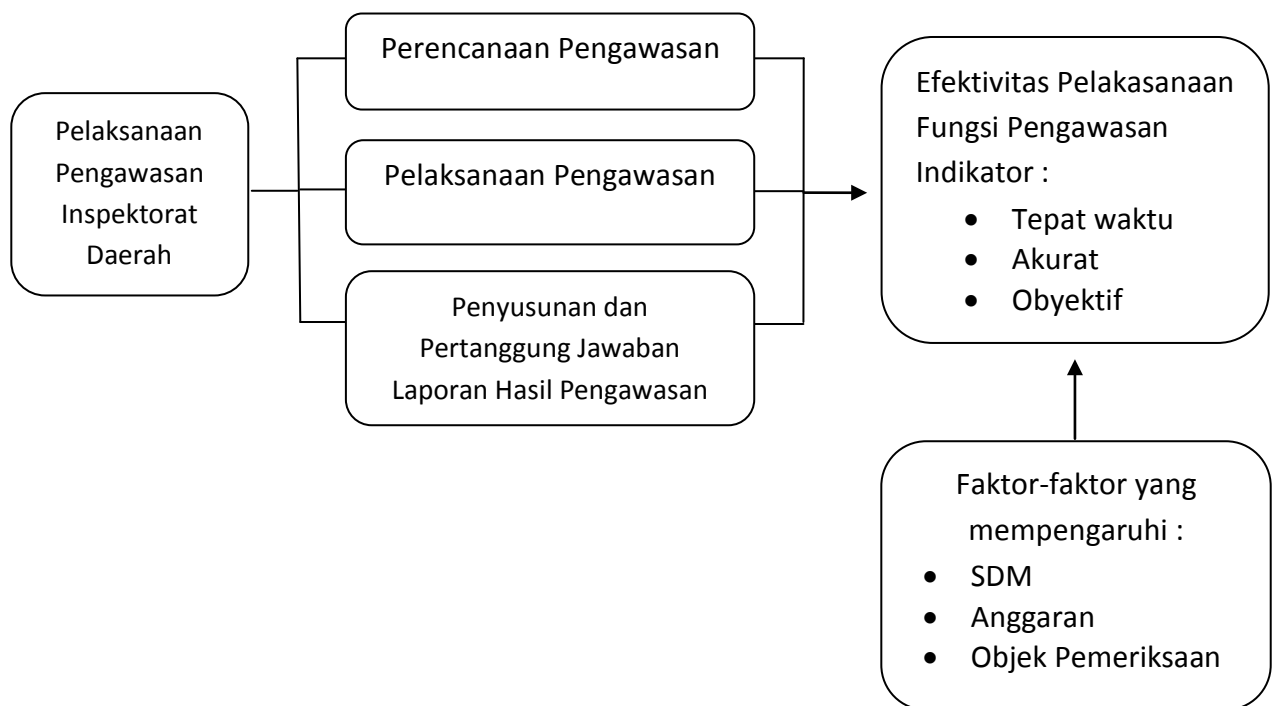
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Baubau No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kota Baubau, susunan Inspektorat Kota Baubau :

- a. Inspektur sebagai Kepala Inspektorat
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, terdiri atas :
 - Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur
 - Seksi Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, terdiri atas :
 - Seksi Kemasyarakatan
 - Seksi Sosial Budaya
- e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi, terdiri atas :
 - Seksi Pembangunan
 - Seksi Ekonomi
- f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD
 - Seksi Keuangan
 - Seksi BUMD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Jabatan Fungsional Auditor
 - Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

2.3. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat, penelitian ini telah dilaksanakan di Kota Baubau yaitu di Kantor Inspektorat Kota Baubau.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran serta pemahaman dan juga menjelaskan bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

3.3. Sumber Data

a. Data Primer, data yang diperoleh dari:

- Hasil observasi, dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Hasil wawancara, dilakukan pada informan yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan.

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari Kantor Inspektorat Kota Baubau

3.4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data dimana peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan narasumber.
- c. Studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang berhubungan tentang buku/artikel program ataupun kebijakan pemerintah, buku/artikel tentang ilmu pemerintahan serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui dan terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang telah dilakukan.

Adapun yang menjadi informan di Inspektorat Kota Baubau dalam penelitian ini yakni:

- Inspektur ;
- Sekrertaris ;
- Kepala Sub Bagian Perencanaan ;
- Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
- Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya ;
- Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi ;
- Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD ;

3.6. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan, untuk memperjelas gambaran penelitian yang dilakukan.

3.7. Definisi Konsep

Setelah melihat dan memahami beberapa konsep yang telah teruraikan, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

- Fungsi pengawasan inspektorat

Inspektorat Daerah mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan,

pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota, serta penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota. Namun yang menjadi indikator pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat daerah dalam penelitian ini yaitu:

- Perencanaan pengawasan
- Pelaksanaan pengawasan
- Penyusunan dan pertanggung jawaban laporan hasil pengawasan

- Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Menurut Reksohadiprodjo (2008, hal. 63) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Oleh karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi pengawasan, ketepatan waktu, serta obyektif dalam pelaksanaan pengawasan.

- Faktor-faktor yang mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi didefinisi konsepan sebagai dimensi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan fungsi

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Baubau.

Adapun faktor internal dan faktor internal yang penulis maksud yakni :

- Faktor Internal yaitu jumlah aparat pengawasan, sedangkan
- Faktor Eksternal yaitu anggaran dan objek pemeriksaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

4.1.1 Sejarah Singkat

Pada mulanya, Bau-Bau merupakan pusat Kerajaan Buton (Wolio) yang berdiri pada awal abad ke-15 (1401 – 1499). Buton mulai dikenal dalam Sejarah Nasional karena telah tercatat dalam naskah Negara Kertagama Karya Prapanca pada Tahun 1365 Masehi dengan menyebut Buton atau Butuni sebagai Negeri (Desa) Keresian atau tempat tinggal para resi dimana terbentang taman dan didirikan lingga serta saluran air. Rajanya bergelar Yang Mulia Mahaguru. Cikal bakal negeri Buton untuk menjadi sebuah Kerajaan pertama kali dirintis oleh kelompok Mia Patamiana (si empat orang) Sipanjonga, Simalui, Sitamanajo,

Sijawangkati yang oleh sumber lisan di Buton mereka berasal dari Semenanjung Tanah Melayu pada akhir abad ke – 13.

Buton sebagai negeri tujuan kelompok Mia Patamiana mereka mulai membangun perkampungan yang dinamakan Wolio (saat ini berada dalam wilayah Kota Bau – Bau) serta membentuk sistem pemerintahan tradisional dengan menetapkan 4 Limbo (Empat Wilayah Kecil) yaitu Gundu-gundu, Barangkatopa, Peropa dan Baluwu yang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang Bonto sehingga lebih dikenal dengan Patalimbona. Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil seperti Tobe-tobe, Kamaru, Wabula, Todanga dan Batauga. Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkan Wa Kaa Kaa (seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawan Kerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun 1332 setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (saat ini hampir sama dengan lembaga legislatif).

Dalam periodisasi sejarah Buton telah mencatat dua Fase penting yaitu masa Pemerintahan Kerajaan sejak tahun 1332 sampai pertengahan abad ke – 16 dengan diperintah oleh 6 (enam) orang raja diantaranya 2 orang raja perempuan yaitu Wa Kaa Kaa dan Bulawambona. Kedua raja

ini merupakan bukti bahwa sejak masa lalu derajat kaum perempuan sudah mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat Buton. Fase kedua adalah masa Pemerintahan Kesultanan sejak masuknya agama Islam di Kerajaan Buton pada tahun 948 Hijriah (1542 M) bersamaan dilantiknya Lakilaponto sebagai Sultan Buton I dengan Gelar Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis sampai pada Muhammad Falihi Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke – 38 yang berakhir tahun 1960.

Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe dan Muna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakan uang yang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya Sistem Desentralisasi (otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).

Dibidang hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton 12 orang

menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu diantaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara digogoli (leher dililit dengan tali sampai meninggal). Bidang perekonomian dimana Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif). Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta dengan falsafah perjuangan yaitu :

“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo”

(Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)

“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu”

(Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)

“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara”

(Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)

“Yinda Yindamo Sara somanamo Agama”

(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)

Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empat Barata (Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empat matana sorumba (Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhis Patamiana (pertahanan kebatinan). Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintah kesultanan, juga mulai membangun

benteng dan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhan masyarakat dan pemerintah dari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masa Kerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun 1332 dan berakhir tahun 1960) berlangsung \pm 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalan sejarah, budaya dan arkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu : Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana dan Kota Bau – Bau (terdapat Keraton Kesultanan Buton).

4.1.2. Letak Geografis dan Batas Wilayah

a. Letak Geografis

Kota Bau Bau terletak dikepulauan jazirah Tenggara pulau Sulawesi dan bila ditinjau dari peta Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak pada $5^{\circ} 21^1 - 5^{\circ} 33^1$ Lintang selatan dan diantara $122^{\circ} 30^1 - 122^{\circ} 47^1$ bujur timur.

b. Luas Wilayah

Daerah Kota Bau-Bau awalnya terdiri dari 4 (empat) kecamatan, namun sejak tahun 2006 telah menjadi 6 (enam) kecamatan ditambah 1 kecamatan pada tahun 2008 maka hingga kini Kota Bau-Bau terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah 22.100 Km^2 , dengan luas tiap kecamatan yaitu ;

Tabel 4.1**Luas Wilayah Kota Bau-Bau menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah
Betoambari	27,89 Km ²
Wolio	17,33 Km ²
Murhum	6,45 Km ²
Kokalukuna	9,44 Km ²
Sorawolio	83,25 Km ²
Bungi	47,71 Km ²
Lea Lea	28,93 Km ²
Total	22.100²

c. Batas Wilayah

Batas – batas wilayah Kota Bau Bau adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Selat Buton
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Kapuntori Kab. Buton
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pasarwajo Kab. Buton
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Kadatua Kab. Buton

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Bau-Bau



4.1.3. Topografi dan Hidrologi

Kondisi fisik permukaan tanah wilayah pesisir terdiri atas dataran rendah, bergelombang hingga berbukit. Kemiringan 0 -8 % terdapat pada bagian utara dan bagian barat Kota Bau Bau yang pada umumnya merupakan wilayah pantai dan cenderung dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman, sedangkan pada bagian arah timur cenderung berbukit yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan masyarakat.

a. Hidrologis

Kota Bau-Bau memiliki pula sungai besar, yaitu sungai Bau-Bau yang membatasi kecamatan wolio dan kecamatan murhum dan membelah kota Bau-Bau. Sungai tersebut umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, irigasi, dan kebutuhan rumah tangga.

b. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di Daerah Kota Bau-Bau umumnya sama dengan daerah sekitarnya yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terbanyak terjadi pada bulan desember dan maret, pada bulan-bulan tersebut angin barat yang bertiup dari Asia dan Samudera Pasifik mengandung banyak uap air (basah). Musim kemarau terjadi mulai bulan mei sampai oktober, pada bulan-bulan ini angin timur yang bertiup dari Australia kurang mengandung uap air (kering).

4.1.4. Penduduk dan Tenaga Kerja

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di kota Bau Bau pada Tahun 2007 sebanyak 126.609 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pertahun selama 10 Tahun sebesar 3,23% dan pada kurung waktu tahun 2006/2007 sebesar 1,86% yaitu dari 122,339 jiwa menjadi 124.609 jiwa pada tahun 2007.(BPS Kota Bau Bau, 2009).

Sedangkan data jumlah penduduk Kota Bau-Bau pada tahun 2008 merupakan proyeksi karena belum adanya data kongkrit mengenai perkembangan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Untuk itu menurut hasil proyeksi yang dilakukan badan pusat statistic kota Bau-Bau atas jumlah penduduk pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3.2. yaitu :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Bau-Bau Menurut Kecamatan Tahun 2010

Kecamatan	Tahun			
	2005	2006	2007	2008
Betoambari	55.195	13.648	13.901	14.246
Murhum	-	42.075	42.830	43.914
Wolio	47.057	32.406	33.028	33.899
Kokalukuna	-	15.101	15.378	15.378
Sorawolio	6.440	6.502	6.624	6.776
Bungi	12.418	12.607	12.848	6.217
Lea – Lea	-	-	-	6.953
Total	121.502	122.339	124.609	127.383

Sumber : Bau-Bau dalam Angka 2010

b. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Pergerakan penduduk kota Bau Bau pada Tahun 2007 sebanyak 126.609 jiwa. Tercatat sebanyak 42,83 jiwa (34,37%) di kecamatan Murhum, 33,028 jiwa (26,51%) di kecamatan Wolio, 15,378 jiwa (12,34%) di kecamatan Kokalukuna, 13,901 jiwa (11,16%) di kecamatan Betombari

dan 12,848 jiwa (10,31%) di Kecamatan Bungi, sisannya 6,624 jiwa (5,32) di kecamatan Sorawolio.

Seiring dengan pergerakan penduduk diatas maka, kepadatan penduduk di kota ini terus meningkat dari tahun ketahun, kepadatan penduduk Kota Bau Bau pada Tahun 1990 sebesar 349 jiwa per km², kemudian pada tahun 2000 sebesar 480 jiwa per km² selanjutnya pada tahun 2007 meningkat menjadi 564 jiwa per km².

c. Struktur Umur Penduduk

Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan imigrasi. Keadaan struktur umur penduduk di Kota Bau-Bau tahun 2007 adalah 59,39% atau sebanyak 74.008 termasuk usia produktif dan penduduk usia non prduktif adalah sebanyak 40,61% atau sebanyak 50.601 jiwa.

d. Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Bau-Bau pada tahuun 2007 sebanyak 87.228 orang, sebanyak 51.701 orang atau 57,27% merupakan angkatan kerja dan sisanya sebanyak 35.527 orang atau 42,73% bukan angkatan kerja. Angkatan kerja tersebut terdiri dari 45.694 orang (88,38%) adalah bekerja dan 6.007 orang (11,62%) merupakan pencari kerja (Pengangguran terbuka).

Ditinjau dari lapangan pekerjaan utama penduduk Kota Bau-Bau terlihat bahwa sektor jasa-jasa dan perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dari jumlah 45.694 orang dengan

status bekerja sebanyak 11.125 orang (24,35%) bekerja disektor perdagangan setelah itu sektor jasa-jasa sebanyak 10.619 orang (23,24%). Sedangkan penduduk yang bekerja dilihat dari tingkat pendidikannya terbesar adalah tamat SLTA Umum sebesar 13.904 orang atau sekitar 30,43%, selanjutnya berturut-turut tamat SD sebesar 9.855 orang (21,57%) dan yang tamat SLTP sebesar 7.212 (15,78%).

4.1.5. Sosial dan Umum

Dalam melaksanakan pembangunan sosial, pemerintah telah mengupayakan berbagai usaha guna terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang sosial yang lebih baik. Usaha tersebut meliputi kegiatan di bidang pendidikan, agama, kesehatan, keluarga berencana, keamanan dan keterlibatan masyarakat serta bidang sosial lainnya.

a. Pendidikan

Semenjak berdirinya kota Bau-Bau hingga tahun pelajaran 2007-2008 jumlah sarana pendidikan di Kota Bau-Bau juga mengalami peningkatan pada tahun pelajaran 2007-2008 jumlah sekolah taman kanak-kanak meningkat yaitu dari 55 unit tahun pelajaran 2006-2007 menjadi 62 unit tahun pelajaran 2007-2008.

Jumlah sekolah dasar pada tahun pelajaran 2007/2008 adalah 71 unit, jumlah guru sekolah dasar meningkat 5,70% dibanding tahun sebelumnya dari 1.069 orang menjadi 1.130 orang, jumlah murid mengalami penurunan dari 18.115 murid pada tahun pelajaran 2006/2007 menjadi sebesar 18.114 murid pada tahun pelajaran 2007/2008.

Jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama pada tahun pelajaran 2007/2008 adalah 26 unit, jumlah guru sebanyak 688 orang guru. Jumlah murid mengalami penurunan dari 8.493 murid pada tahun pelajaran 2006/2007 menjadi sebesar 7.970 murid pada tahun pelajaran 2007/2008 atau sebesar 6,16%.

Jumlah sekolah lanjutan tingkat atas pada tahun pelajaran 2005/2006 sampai dengan tahun pelajaran 2007/2008 adalah 16 unit, tetapi pada tahun 2007/2008 naik menjadi 22 unit. Jumlah guru pada tahun pelajaran 2006/2007 sebanyak 516 orang guru meningkat menjadi 821 orang guru pada tahun pelajaran 2007/2008 atau naik 59,11%. Jumlah murid juga mengalami peningkatan dari 7.030 murid pada tahun pelajaran 2006/2007 menjadi sebesar 9.707 murid pada tahun pelajaran 2007/2008 atau sebesar 38,08%.

Jumlah perguruan tinggi yang ada di Kota Bau-Bau yaitu sebanyak 8 (delapan) buah yaitu, Universitas Dayanu Ikhasanuddin (UNIDAYAN), Sekolah Tinggi Agama Islam Qaimuddin (STAI), Universitas Islam Buton (UNISBUN), Universitas Muhammadiyah Buton (UMB), Institut sains dan Teknologi (IST), Amik Milan Dharma, Akademi Keperawatan (AKPER), Akademi Kebidanan (AKBID), Sekolah Perawat Kesehatan (SPK).

b. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang ada di Kota Bau-Bau terdiri dari ;

1. Transportasi Darat ; yang terdiri dari becak, sepeda motor, serta mobil/bus. Saat ini transportasi yang menggunakan motor (ojek) masih merupakan primadona yang digunakan oleh mayoritas warga Kota Bau-Bau. Untuk angkutan mobil, dilayani jalur angkutan kota, angkutan pedesaan, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) serta antar kota provinsi (AKAP).

2. Transportsi Laut ; terdapat 4 jenis pelabuhan (dermaga) di Kota Bau-Bau, yaitu dermaga pelelangan dan penampungan ikan, pelabuhan rakyat, pelabuhan nusantara (Umum) dan pelabuhan penyebrangan very. Dimana kesemua pelabuhan/dermaga tersebut rutin disinggahi oleh kapal-kapal yang sesuai dengan peruntukannya.

3. Transportasi Udara ; terdapat 1 buah bandar udara yang terdapat di dalam wilayah Kota Bau-Bau yaitu bandar udara Betoambari. Dimana bandara ini dapat disinggahi oleh pesawat cassa dengan penumpang 60 orang. Yang melayani rute Bau-Bau menuju Makassar (SULSEL) selama satu minggu setiap jam 12.00 dan 14.00 WITA. Disamping itu tahun 2011 nanti akan ditambah dengan armada Boeing 727 dengan kapasitas 150 seat/orang.

4.1.6 Kondisi Monografi

a. Pertanian

Kota Bau-Bau memiliki dua wilayah kecamatan yang masih mengandalkan potensi di bidang pertanian yaitu Kecamatan Bungi dan

Kecamatan Sorawolio. Daerah kota Bau Bau dengan luas 22.100 ha pada tahun 2008, 41,55% merupakan lahan yang diusahakan untuk pertanian yang terdiri dari lahan tegal/kebun sebesar 16,81%, lahan perkebunan 8,86%, ladang/huma seluas 5,90%, lahan sawah 5,24%, lahan untuk tanaman kayu-kayuan 4,44% dan lahan untuk tambak/kolam/tebat dan empang 0,32%. Sedangkan wilayah hutan negara masih cukup luas terdapat di Kota Bau Bau yang sangat penting sebagai daerah resapan air hujan. (BPS Kota Bau Bau, 2009)

Tanaman padi sawah pada tahun 2008 memiliki luas panen sebesar 1.951 ha dengan hasil produksi sebesar 9.811,51 ton yang hanya terkonsentrasi pada dua kecamatan yaitu kecamatan sorawolio dengan luas panen sebesar 171 ha yang mencapai produksi sebesar 522,51 ton, dan kecamatan bungi dengan luas panen 1.780 ha yang mencapai hasil produksi sebesar 8.989 ton. Bila dibandingkan dengan tahun 2007 maka produksi padi sawah pada tahun 2008 terjadi kenaikan sebesar 6,65% dimana pada tahun 2007 produksi padi sawah sebanyak 9.281 ton, sedangkan tahun 2008 mencapai 9.811,51 ton. (BPS Kota Bau Bau, 2009).

Pada tahun 2008 seiring dengan menurunnya luas panen tanaman jagung menjadi 287 ha, maka produksinya juga mengalami penurunan yang cukup drastis dengan hasil produksi sebesar 45,30% bila dibandingkan dengan hasil produksi tahun 2007 yang mampu mencapai produksi 1.170,90 ton. Untuk tanaman ubi kayu dengan luas panen 1,72

ha mencapai hasil produksi sebesar 1.531,26 ton dimana terjadi peningkatan hasil produksi tanaman ubi kayu sebesar 33,26% bila dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun 2007 yang mencapai 1.149,12 ton. Sementara itu tanaman ubi jalar dengan luas panen sebesar 48 ha yang mencapai produksi sebesar 259,98 ton mengalami penurunan hasil produksi sebesar 46,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan produksi tanaman ubi jalar sebesar 149,49 ton. (BPS Kota Bau Bau, 2009)

Hasil produksi sayur-sayuran pada tahun 2008 yang dominant adalah tanaman tomat dengan produksi 100 kwintal. Hasil-hasil sayuran lainnya yang cukup tinggi adalah kangkung, kacang panjang, cabe, terung dan buncis masing-masing dengan hasil produksi sebesar 70 kwintal, 50 kwintal, 44 kwintal, 40 kwintal dan 21 kwintal. Hasil produksi buah-buahan yang paling menonjol pada tahun 2008 adalah buah nangka sebanyak 15.208 kwintal dan buah pisang dengan hasil produksi sebesar 10.501 kwintal. Sedangkan buah-buahan yang kecil produksinya adalah buah durian sebesar 3 kwintal. (BPS Kota Bau Bau, 2009)

Komoditas hasil perkebunan yang paling menonjol tahun 2008 adalah cokelat dan jambu mete yang mencapai masing-masing sebanyak 99 ton dan 83 ton. Keduanya mengalami peningkatan produktif bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 2,86% dan 29,69%. Sementara itu komoditi tanaman perkebunan pada tahun 2007 tidak memberikan hasil tetapi pada tahun 2008 berproduksi

adalah pinang dan pala masing-masing 10 ton dan 1 ton, sebaliknya tanaman tembakau merupakan komoditi perkebunan yang pada tahun 2008 tidak mampu menghasilkan tetapi tahun sebelumnya mampu memproduksi sebesar 17 ton.

b. Peternakan

Jumlah populasi ternak besar dan kecil di Kota Bau Bau pada tahun 2008 secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 populasi sapi, kambing dan babi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni masing-masing sebesar 16,58%, 22,35%, dan 10,89%. Demikian pula dengan ternak unggas juga mengalami peningkatan yaitu ayam kampung sebesar 13,74%, ayam ras sebesar 5,69% dan itik sebesar 31,85%. Untuk memenuhi konsumsi masyarakat akan daging produksi ternak besar, kecil dan unggas juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing 14,03%, 13,40% dan 23,67%. Demikian pula dengan produksi telur unggas juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 19,47% dari 1.747.800 kg pada tahun 2007 menjadi 2.088.110 kg pada tahun 2008. (BPS Kota Bau Bau, 2009).

c. Perikanan

Meskipun secara kewilayahan Kota Bau-Bau hanya memiliki luas wilayah lautan sebesar 200 mil, namun demikian potensi perikanan yang berasal dari daerah sekitar (khususnya Kabupaten Buton) terakumulasi di Kota Bau-Bau, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun

untuk kebutuhan ekspor. Berbagai jenis hasil produksi perikanan yang terakumulasi di Kota Bau-Bau seperti Ikan Pelagis Besar (Tuna, Cakalang), Ikan Pelagis Kecil (Julung-julung, Layang, Kembung), Ikan Demersal (Sunu, Kerapu, Kakap, Boronang, Ekor kuning, Lobster, Pari) serta hasil laut lainnya seperti Cumi-cumi pulpen, Teripang, Kerang-kerang (biota laut), Benur, Eucheuma, Spinosum dan sebagainya.

Hasil produksi perikanan laut pada tahun 2008 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2007 sebesar 6,74%. Dimana untuk perikanan tahun 2007 sebanyak 8.979 Ton sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 8.374 Ton.

Wilayah pengembangan budidaya rumput laut di Kota Bau-Bau tersebar pada berbagai kelurahan yang terletak di daerah pesisir, yaitu Kelurahan Palabusa, Kalia-Lia, Kolese dan Lowu-Lowu (Kecamatan Bungi), Kelurahan Lakologou, Waruruma, Sukanaeyo dan Liwuto (Kecamatan Kokalukuna), Kelurahan Nganganaumala, Wameo, Tarafu dan Bone-Bone (Kecamatan Murhum), Kelurahan Katobengke, Lipu dan Sulaa (Kecamatan Betoambari). Luas areal perairan yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya rumput laut berkisar 960 Ha di sepanjang garis pantai potensial, yaitu sekitar 23 Km untuk Kecamatan Bungi dan Kokalukuna, dan sekitar 9 Km untuk Kecamatan Murhum dan Betoambari. Namun demikian, hingga tahun 2007 lahan perairan yang dimanfaatkan sekitar 111,6 Ha.

d. Kehutanan

Luas kawasan hutan yang telah ditetapkan di wilayah kota Bau Bau seluas 27.001 ha, dimana menurut jenisnya sebagian besar diperuntukkan pada penggunaan lainnya yaitu sebesar 51,01% sebesar 17,74% berupa hutan lindung, 16,55% merupakan hutan produksi biasa, sementara hutan produksi sebesar 12,89% dan sisanya hutan wisata. (BPS Kota Bau Bau, 2009).

e. Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan sektor utama dalam perekonomian suatu daerah karena cukup menyumbang PDRB Kota Bau Bau. Di Indonesia inddustri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri besar, industri sedang, industri sedang dan industri rumah tangga. Pengelompokkan ini berdasarkan pada banyaknya pekerja yang terlibat di dalamnya tanpa memperhatikan penggunaan mesin produksi yang digunakan ataupun modal yang ditanamkan.

Berdasarkan data pada Kota Bau Bau dalam angka tahun 2009 terlihat bahwa industri besar sejak tahun 2009 hingga tahun 2008 tidak terjadi penambahan yaitu dengan jumlah tenaga kerja yang semakin menurun dari sejumlah 280 orang pada tahun 2007 menjadi 180 orang tahun 2009. Demikian juga dengan industri sedang tidak ada penambahan yaitu dengan total tenaga kerja sebanyak 90 orang yang juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Industri kecil dan industri rumah tangga dimana pada tahun 2008 terjadi penambahan masing-masing dari

69 buah menjadi 132 buah dengan jumlah tenaga kerja 985 orang, dari 472 buah menjadi 848 buah dengan tenaga kerja sebanyak 1.588 orang. Meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri kecil dan rumah tangga mengindikasikan semakin berkurangnya pengangguran (BPS Kota Bau Bau, 2009).

4.1.7. Pemerintahan

Pemerintah Daerah adalah Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan Daerah bertanggungjawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggungjawab sebagai legislatif. Kota Bau-Bau dipimpin oleh seorang Walikota, untuk melaksanakan tugasnya, dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan masyarakat terdapat unsur-unsur pembantu pimpinan pemerintah Daerah yaitu sekretaris Daerah (SETDA) dan Lembaga Teknis Dinas seperti Dinas-Dinas, Badan-Badan dan Kantor.

a. Kondisi Pemerintahan

Wilayah Kota Bau-Bau keadaan tahun 2009 terdiri dari 7 kecamatan dan 43 kelurahan, dimana pada akhir tahun 2008 tepatnya bulan oktober kecamatan Lea-Lea mekar dari kecamatan Bungi serta terjadi pemekaran 2 kelurahan yaitu kelurahan Kantalai (pemekaran dari kelurahan Kalia-lia) dan Kelurahan Tampuna (Pemekaran dari kelurahan Kampeonaho).

Jika dilihat dari pengembangan wilayah kecamatan dan kelurahan tahun-tahun sebelumnya (1998), maka daerah Kota Bau-Bau telah mengalami perubahan yaitu dari 2 kecamatan tahun 1998 menjadi 4 (empat) kecamatan yaitu kecamatan Betoambari, Kecamatan Wolio, Kecamatan Sorawolio dan Kecamatan Bungi. Pada Tahun 2003 dengan jumlah 9 desa dan 29 kelurahan, sedangkan pada tahun 2004 berubah menjadi 38 kelurahan sampai tahun 2006 baru ada pembentukan 2 kecamatan baru yaitu kecamatan Murhum (Pecahan dari kecamatan Betoambari) dan Kecamatan Kokalukuna (pecahan dari Kecamatan Wolio). Jumlah Lurah menurut jenis kelamin di Kota Bau-Bau yakni 36 orang Lurah Laki-Laki dan 7 orang Lurah Perempuan.

b. Keuangan Daerah

Kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah sangat tergantung dari tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah, sehubungan dengan itu maka Pemerintah Kota Bau-Bau membiayai kegiatannya selama tahun 2008 dengan memanfaatkan 4 sumber yakni ; sisa lebih perhitungan tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah.

Pada tahun 2009 realisasi pendapatan rutin Kota Bau-Bau sebagaimana tercatat mencapai angka 369.447.171,115 ribu rupiah dan lebih tinggi dari anggaran belanja daerah sebesar 386.193.071,869 ribu rupiah atau dinyatakan defisit sebesar 16.745.900,754 ribu rupiah. Walaupun memang dari segi pendapatan terjadi kenaikan yang cukup

signifikan dari pendapatan asli daerah sendiri yang mencapai 133,04 %, sebaliknya bagian dari perimbangan tidak mampu mencapai target pendapatan yang direncanakan karena turun sebesar 0,99%.

Penyumbang terbesar penerimaan PAD di kota Bau-Bau diperoleh dari sektor lain-lain pendapatan dan bagi hasil pajak masing-masing sebesar 37,53% dan 36,82 %, untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran menghasilkan sebesar 24,24 %, industri pengolahan sebesar 11,01 %. sedangkan yang terendah adalah penerimaan bagi hasil bukan pajak sebesar 2,09%.

4.1.8. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Kota Bau Bau

a. Visi Pembangunan Kota Bau Bau

Berdasarkan kondisi umum yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan Kota maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional maupun global, maka Visi jangka panjang (20 tahunan) Kota Bau-Bau disepakati sebagai berikut : *"Terwujudnya Kota Bau-Bau Sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa Yang Nyaman, Maju, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023"*

Untuk mewujudkan harapan dan cita-cita seperti yang dimaksud dalam visi jangka panjang tersebut di atas, maka perlu ditetapkan sebuah visi lima tahunan (2008 - 2013) sebagai dasar membangun dan mengembangkan Kota Bau-Bau ke depan yaitu : *"Terwujudnya Kota Bau-*

Bau sebagai Kota Budaya yang produktif dan nyaman, melalui optimalisasi sumberdaya lokal secara profesional dan amanah, menuju masyarakat sejahtera, bermartabat, dan religi”.

Dari visi tersebut kemudian dirumuskan dalam butir-butir penjelasan visi pembangunan Kota Bau Bau, yaitu :

1. Kota Budaya yang Produktif dan Nyaman - Kota dimana Masyarakatnya tumbuh dari identitas budaya yang kokoh - Citra nilai-nilai budaya yang dikenal luas - Kota yang terus mengalami peningkatan aksesibilitas terhadap sumberdaya lokal - Kota yang terus meningkatkan Peluang Berusaha bagi Masyarakat & Pengusaha - Kota yang terus memperbaiki sistem pelayanan publik - Kota yang nyaman untuk tempat tinggal dan berusaha/berbisnis bagi siapa saja (*liveability*)
2. Optimalisasi Sumberdaya Lokal secara Profesional dan Amanah Optimalisasi Sumberdaya Lokal : Pengelolaan sesuai kapasitas, Sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya budaya, sumberdaya buatan/teknologi, dan sumber-sumber penerimaan daerah Profesional : Melalui pemanfaatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Amanah : Mengedepankan aspirasi masyarakat demi kepentingan bersama
3. Masyarakat Sejahtera, Bermartabat, dan Religi - Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat - Berahlak dan memegang teguh nilai-

nilai budaya positif - Masyarakat yang kehidupannya bernafaskan agama

b. Misi Pembangunan Kota Bau Bau

Berdasarkan Visi di atas, maka dikembangkan 7 (tujuh) Butir Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan peran dan posisi Kota Bau Bau sebagai simpul perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktivitas.
2. Meningkatkan citra budaya lokal tingkat regional, nasional dan internasional.
3. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi
4. Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah dan menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan.
6. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik.
7. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif.

Penjelasan makna kata-kata kunci yang terkandung dalam Misi Kota Bau-Bau Tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :

Misi - 1 : Memantapkan peran dan posisi Kota Bau-Bau sebagai simpul perdagangan dan pelayanan jasa yang berorientasi pada produktivitas. Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Bau-Bau sebagai kota perdagangan dan pelayanan jasa yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip co-opetitive (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga professional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Misi - 2 : Meningkatkan citra budaya lokal pada tingkat regional, nasional, dan internasional. Misi ini akan dilakukan dengan pencitraan nilai-nilai budaya, peningkatan kualitas dan kuantitas informasi, pemberdayaan lembaga-lembaga adat, dan pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata regional sehingga dapat mempromosikan Kota Bau-Bau sebagai kota yang memiliki modal budaya dan secara historik tumbuh dan berkembang dari Pusat Kerajaan Buton, yang terletak pada Gerbang Paling Timur Kerajaan Melayu, sehingga unggul dan terkemuka dalam pengembangan budaya lokal dan seni, dan memiliki keunikan.

Misi - 3 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan religi. Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi - 4 : Meningkatkan kelancaran mobilitas internal dan eksternal wilayah, dan menciptakan kenyamanan dalam beraktivitas bagi masyarakat kota. Misi ini ditempuh melalui peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Bau-Bau sebagai kota pantai (seafront city) dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas public space yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diharapkan dapat meningkatkan citra kota dari aspek liveability (menjadi tempat tinggal yang nyaman), investability (kondusif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), dan visitability (kota yang selalu dikunjungi karena kesan dan daya jangkau).

Misi - 5 : Meningkatkan kemandirian masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan. Misi ini ditempuh melalui pemberdayaan masyarakat, stimulasi tumbuh-kembangnya berbagai usaha kecil dan menengah, peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditempuh

secara berbarengan dengan penguatan lembaga-lembaga masyarakat, pemuda, dan pengarusutamaan gender (gender main streaming), serta peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan (participatory development).

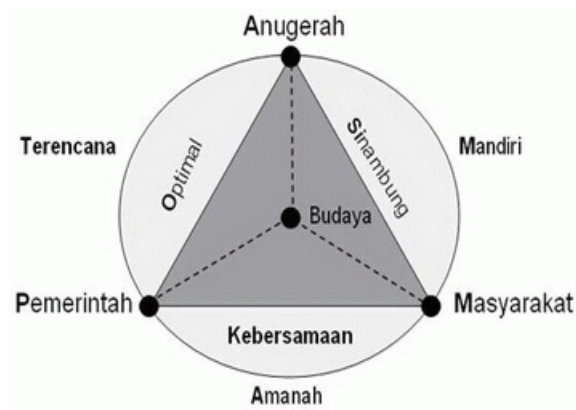
Misi - 6 : Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sistem pelayanan publik. Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi - 7 : Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menciptakan iklim politik dan keamanan yang kondusif, Misi ini ditempuh dengan mendorong terwujudnya jaminan kepastian hukum dan hak berpolitik warga, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya dan hukum adat, menjamin tumbuhnya demokrasi, rasa keamanan dan keadilan bagi masyarakat, dan melindungi hak-hak politik demokrasi dan hak asasi manusia baik melalui produk peraturan-peraturan maupun melalui perwujudan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Maka Untuk mewujudkan visi dan misi serta program pembangunan sehingga dibutuhkan strategi pencapaian yang tepat dan

handal. Strategi Pembangunan Kota Bau-Bau Tahun 2008-2013 akan ditempuh melalui penguatan TIGA PILAR pembangunan, yakni Pemerintah (P), Masyarakat (M), dan Anugerah (A) (disini kata Anugerah digunakan sebagai representasi secara luas kata: Sumberdaya Lokal), dan dalam hal ini Budaya dan Agama merupakan perekat/pengikat (node) TIGA PILAR tersebut.

Gambar 4.2 Pilar POMaMaSIKA



c. Strategi TIGA PILAR dalam ranah POMaMaSiKA

a. Strategi Peningkatan Profesionalisme Pengelolaan Pemerintahan (Pilar P=Pemerintah)

Pilar P (Pemerintah) memuat strategi peningkatan profesionalisme pengelolaan pemerintahan (good governance) yang berujung pada peningkatan citra dan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah mengutamakan prinsip Optimalisasi dalam berbagai aspek, terutama

dalam mengelola dan mendayagunakan sumberdaya lokal (anugerah Ilahi) berupa anugerah wilayah, kekayaan alam, keindahan alam, budaya, dll untuk kepentingan bersama.

b. Strategi Peningkatan Kapasitas dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan (Pilar M = Masyarakat)

Pilar M (Masyarakat) memuat strategi peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pengembangan kemampuan diri (self capacity) dan kemampuan mengorganisasi diri (self organization), dan peningkatan peran aktif dan pelibatan seluruh potensi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Kota Bau-Bau. Ini juga termasuk strategi peningkatan kesempatan (dalam konteks keadilan atau equity) bagi masyarakat dalam upaya pemanfaatan segala sumberdaya lokal yang merupakan anugerah Ilahi yang ada secara Mandiri dan berkeSinambungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Strategi Peningkatan Daya Manfaat (Utility) dan Nilai (Value) Sumberdaya Lokal (Pilar A = Anugerah)

Pilar A (Anugerah Ilahi) memuat strategi peningkatan manfaat dan nilai sumberdaya lokal (*local resources*) yang secara ekonomi dan sosial budaya merupakan penyangga utama pembangunan Kota Bau-Bau. Strategi ini diorientasikan pada pemanfaatan secara efektif-berkeadilan sumberdaya lokal bagi kesejahteraan masyarakat dengan prinsip Kebersamaan dan Amanah, dan tetap memperhatikan kelestariannya

(*sustainable use*). Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal perlu selalu dilakukan secara Terencana melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi dan pelibatan kalangan profesional.

4.2. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Baubau

Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di setiap sektor. Oleh karena itulah salah satu cara yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pembangunan adalah melalui pengawasan dimana fungsi dan peran pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah telah sesuai dengan yang direncanakan, dan selain itu dilakukan tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Inspektorat Kota Baubau. Dimana fungsi dan peran kantor Inspektorat adalah perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan administrasi, penyusunan laporan hasil pengawasan, pengelolaan barang milik, pengawasan atas pelaksanaan tugas, pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Walikota, serta

penyampaian laporan hasil pengawasan, evaluasi, saran dan pertimbangan kepada Walikota.

Pentingnya fungsi dan peran kantor Inspektorat di Kota Baubau maka perlu dilakukan penilaian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itulah maka penilaian efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Baubau ditekankan pada perencanaan program pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan, serta pertanggung jawaban hasil pengawasan. Adapun hasil penilaian efektivitas dari masing-masing pelaksanaan pengawasan di Kantor Inspektorat Kota Baubau dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Perencanaan Program Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Salah satu yang menjadi hal yang paling mendasar dalam sebuah pencapaian suatu organisasi adalah terletak dari bagaimana organisasi tersebut mampu membuat suatu perencanaan. Sebagai lembaga pemerintahan daerah yang memiliki tujuan mengawasi jalannya pemerintahan di suatu daerah. Inspektorat Kota Baubau tentu memiliki sebuah perencanaan untuk bisa mengawasi jalannya pemerintahan yang ada di daerah Kota Baubau.

Perencanaan yang dibuat tergambar dalam wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, **Bapak Hamsah** yang menyatakan :

“Sebelum melakukan pemeriksaan, Inspektorat Kota Baubau terlebih dahulu membuat perencanaan program pengawasan dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)”.

(Wawancara tanggal 22 Februari 2013, Pukul 11.30 WITA)

Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) merupakan wujud dari pengaplikasian fungsi inspektorat yang tercermin dalam peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2008 yang menjadi tuntutan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sebelum tahun anggaran dimulai. Namun sebelum PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) itu disetujui di tingkat provinsi, Inspektorat Kota Baubau terlebih dahulu membuat RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan). Hal ini sesuai dengan penjelasan Sekertaris Inspektorat, **Bapak La Sanu** yang mengatakan :

“Sebelum diusulkan dalam rapat koordinasi pengawasan di inspektorat provinsi yang dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kota/Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu kami membuat Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan atau RPKPT”

(Wawancara tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)

Setelah RPKPT yang diusulkan oleh Inspektorat diberikan kepada Walikota dan disetujui lalu diterima usululan RPKPT tersebut di tingkat provinsi , barulah RPKPT sah menjadi PKTP. Alasanya karena supaya tidak terjadi tumpang tindih antara rencana pengawasan inspektorat kota

dengan inspektorat provinsi didalam melakukan pengawasan nantinya.
(Wawancara dengan Bapak Mursidin, tanggal 23 Februari 2014, pukul 16.30 WITA selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur).

Didalam pembuatan suatu perencanaan dibutuhkan sebuah pengalaman dan kompetensi. Kemampuan menganalisis kebutuhan dan juga pengawasan dalam pembuatan perencanaan tentu tidak terlepas dari mutu para pembuat perencanaan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Inspektur Inspektorat Kota Baubau, **Bapak Armin** yang menyatakan :

“Pembuatan RPKPT (Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan) dilakukan oleh para pejabat inspektorat yang memiliki cukup pengalaman dan berkompeten”.
(Wawancara tanggal 26 Februari 2013, Pukul 11.00 WITA)

Banyaknya pengalaman yang telah didapatkan dan kompetensi yang dimiliki oleh para pejabat inspektorat dalam membuat perencanaan membuat para pejabat tersebut tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat RPKPT. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada Inspektur Bidang Pembangunan dan Ekonomi, **Bapak Munir Jaya** yang mengatakan :

“Pembuatan Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT) itu kami buat paling lama 3 (tiga) hari”.
(Wawancara tanggal 1 Maret 2013, pukul 10.45 WITA)

Hal ini menyerupai dengan apa yang dikatakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, **Ibu Sitti Nurbaya** yang mengatakan bahwa :

Alhamdulillah RPKPT yang setiap tahun kita buat selalu selesai dalam 2 (dua) hari.

(Wawancara tanggal 28 Februari 2013, pukul 14.00 WITA)

Setelah mengajukan rancangan program kerja pengawasan tahunan (RPKPT) kepada Inspektorat Provinsi dan kemudian telah disetujui oleh Walikota Baubau, maka ditetapkanlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman pelaksanaan pemeriksaan.

Didalam pembuatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tentu tidak terlepas dari target yang akan dicapai oleh Inspektorat Kota Baubau dalam menunjang Visi dan Misinya. Hal ini tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3. Rencana Pencapaian Sasaran Inspektorat Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Peningkatan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP
	Jumlah SKPD yang diperiksa	61 obyek pemeriksaan
	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	75%
	Presentase kerugian daerah/negara yang dikembalikan	50%
	Presentase tindak lanjut atas temuan BPK dan APIP yang sesuai rekomendasi	70%
Peningkatan	Presentase pegawai yang	70%

profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah	lulus kualifikasi pemeriksa	
	Jumlah pelatihan internal	5
Terwujudnya sistem pengawasan yang memadai	Jumlah standar prosedur pengawasan yang dibuat	2
	Presentase cakupan SPIP	20%

Sumber : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Kota Baubau 2013

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa indikator – indikator dari efektifitas dalam pembuatan perencanaan pengawasan cukup terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kemampuan, pengalaman, serta kompetensi yang dimiliki para pejabat inspektorat sehingga para pejabat inspektorat mampu menghasilkan sebuah sasaran yang ingin dicapai di tahun 2013. (Hasil pengamatan penulis dalam melakukan wawancara dengan informan)

4.2.2. Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Berdasarkan hasil penilaian mengenai efektifitas perencanaan pengawasan yang dilakukan maka penilaian selanjutnya yaitu bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat telah menjadi kewajiban bagi para pejabat Inspektorat Kota Baubau untuk dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pengawasan yang telah dibuat dalam bentuk PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Didalam melakukan pengawasan yang dilakukan inspektorat tentu tidak terlepas dari prosedur pengawasan yang digunakan. Seperti yang dikatakan oleh Inspektur Inspektorat Kota Baubau, **Bapak Armin** bahwa :

“Prosedur pengawasan yang dilakukan yaitu regular dan pengawasan khusus. Pengawasan regular yaitu pengawasan yang dilakukan secara komprehensif sesuai dengan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), sedangkan pengawasan khusus yaitu pengawasan yang dilakukan atas perintah Walikota. Dan ada juga pengawasan secara monitoring yaitu pengawasan yang dilakukan dengan menindak lanjuti laporan hasil pemeriksaan”.
(Wawancara tanggal 26 Februari 2013, pukul 11.00 WITA)

Hal di atas senada dengan yang dikatakan **Bapak Mursidin** selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang menyatakan:

“Ada 2 (dua) bentuk pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan regular yang berdasar dari PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) dan pengawasan khusus yang bersumber dari perintah Walikota ataupun pengaduan masyarakat.
(Wawancara tanggal 23 Februari 2013, pukul 16.30 WITA)

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan baik oleh para pejabat inspektorat nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan PKPT yang telah dibuat. Namun keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak terlepas dari siapa yang melaksanakannya. Yang berhak ataupun memiliki wewenang seharusnya yang berkompeten dan yang menduduki jabatan fungsional yaitu auditor dan P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah). **(Wawancara dengan Kepala**

Sub Bagian Perencanaan, Bapak Hamsah, tanggal 22 Februari 2013, pukul 11.30 WITA)

Sesuai dengan standar audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no.PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 pada standar umum telah ditetapkan tentang standar Keahlian bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya, selanjutnya pada standar pendidikan auditor, telah ditetapkan bahwa auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal S1 atau yang setara.

Tahapan-tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau terperinci berdasarkan hasil wawancara dengan **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bapak Hamsah** yakni sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim.

- a. Didasarkan pada :

- Surat perintah kepala Inspektorat atas nama Walikota yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim.
 - Surat perintah untuk penanganan yang bersifat khusus yang berisikan susunan tim, auditan, ruang lingkup, audit, waktu secara kewajiban yang dibebankan kepada tim.

b. Susunan, Wewenang dan Tanggung jawab Tim

- Menetapkan personal tim
- Mendatangi surat perintah tim atas nama walikota
- Melaksanakan review pelaksanaan audit
- Menerima ekspose hasil audit dari koordinasi dan ketua tim
- Mendatangi LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
- Memaraf surat walikota
- Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan audit

2. Pemberitahuan Pada Auditan

Sebelum 2 (dua) minggu pelaksanaan pengawasan. Pemberitahuan ini menyangkut kapan pemeriksaan akan dilaksanakan, lamanya pemeriksaan dan nama pemeriksa yang akan ditugaskan. Dalam pemberitahuan ini harus dilampirkan daftar permintaan informasi dan data yang akan diperlukan untuk survey pendahuluan.

3. Survey

Proses sebelum dilakukan pemeriksaan langkah awal yang dilakukan oleh inspektorat adalah melakukan survey program kerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Baubau kemudian dijadikan objek atau sasaran pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang mendapatkan mandat untuk menjalankan pemeriksaan. Langkah ini dilakukan dengan jangka waktu selama satu minggu.

Beliau juga menjelaskan bahwa :

“Dilakukan survey lapangan sebagai langkah pertama dalam proses pemeriksaan perlu dilakukan pengumpulan data yang relevan dengan kegiatan objek yang akan diperiksa sebagai dasar dalam penyusunan program kerja pemeriksaan (PKP). Dan pada saat kami melakukan survey kami membutuhkan waktu satu minggu dalam pengambilan data pada setiap SKPD yang akan diperiksa”. **(Tanggal 22 Februari 2013, pukul 11.30 WITA).**

Berdasarkan buku Petunjuk Oprasional Pemeriksaan (POP) regular Inspektorat Kota Baubau tahun 2008, data yang perlu dikumpulkan pada saat survey pendahuluan meliputi:

- a) Data permanent seperti peraturan-peraturan, struktur organisasi, uraian tugas, prosedur, kebijaksanaan dan lain-lain.
- b) Data yang tidak permanen antara lain data keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lain-lain.
- c) Data yang menyangkut tentang aktivitas objek yang akan diperiksa:
 - a. Tujuan penelaahan terhadap pengumpulan data permanen. Untuk mendapatkan pengertian yang sejelas-jelasnya mengenai wewenang yang menjadi dasar kegiatan dan tujuan program yang akan diperiksa, mengembangkan langkah-langkah pemeriksaan dalam menentukan ketaatan objek yang akan diperiksa terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar wewenangnya, baik yang menyangkut kebijaksanaan prosedur maupun pelaksanaannya, dan untuk

mendapatkan gambaran mengenai kedudukan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja dari objek yang akan diperiksa.

- b. Tujuan penelaahan terhadap data tidak permanen. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbandingan besarnya anggaran dan relevansi dari pendapatan belanja baik tahun lalu maupun tahun berjalan, mengenai kualifikasi pegawai baik kualitas maupun kuantitas, dan tersedianya sarana dan prasarana dari objek yang diperiksa.
- c. Tujuan penelaahan terhadap aktivitas objek yang akan diperiksa yaitu mendapatkan gambaran mengenai ruang lingkup aktivitas dari objek yang akan diperiksa yang meliputi laporan-laporan kegiatan dari objek yang akan diperiksa, laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional lainnya dan informasi dari pihak yang mempunyai hubungan objek yang diperiksa.

Hal yang serupa diungkapkan Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi, **Bapak Bapak Erman**, yang mengatakan bahwa:

“Waktu yang diperlukan dalam melakukan survey oleh tim pemeriksa selama satu minggu. Dalam jangka waktu tersebut tim pemeriksa melakukan pengambilan data yang mereka butuhkan sebagai acuan pada saat pemeriksaan ingin dilakukan”.
(Wawancara tanggal 1 Maret 2013, pukul 10.45 WITA)

4. Program Kerja Pemeriksaan.

Setelah itu yang dilakukan oleh pemeriksa adalah pembahasan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dengan kepala perangkat daerah guna menjelaskan maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan. PKP menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan ditempuh setelah dilakukannya survey. PKP disusun oleh anggota tim pemeriksa dan disetujui oleh ketua tim.

Berdasarkan POP Reguler Inspektorat Kota Baubau, PKP harus berfungsi sebagai berikut:

- Rencana yang sistematis
- Landasan pemeberian tugas dari penanggung jawab pemeriksa kepada kepala bidang.
- Alat pembanding bagi kepala bidang antara lain peleksaanaan kegiatan dengan rencana-rencana yang ditetapkan.
- Alat pembantu dan melatih para kepala bidang dan penanggung jawab pemeriksa tentang urutan langkah yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaaan.

a. Susunan dari isi PKP:

- Informasi instansi yang diperiksa, sifat, dan periode yang diperiksa.
- Tujuan dan ruang lingkup.

- Sasaran pemeriksaan.
- Pola laporan yang dikehendaki dapat berupa BAB atau surat.
- Instruksi-instruksi khusus.

Langkah selanjutnya yaitu dalam wawancara dengan **Bapak Hamsah**, beliau mengungkapkan bahwa :

“Setelah dilakukannya survey dan penyusunan PKP maka dilakukan pengujian terhadap pengendalian manajemen yang meliputi organisasi seperti organisasi, kebijakan, prosedur, personalia, perencanaan, akutansi, pelaporan, dan pengawasan interen pada perangkat daerah yang ingin diperiksa”. **Hal yang sama persis diutarakan oleh Sekertaris Inspektorat Bapak La Sanu, tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA.**

5. Kertas Kerja Pemeriksaan.

Ketua tim wajib melengkapi hasil pemeriksaan dengan surat temuan, dan kertas kerja pemeriksaan serta melakukan pembahasan tentang hasil-hasil pemeriksaan dengan kepala perangkat daerah. Daftar temuan disusun berdasarkan urutan-urutan. KKP adalah catatan dan data yang dikumpulkan secara sistematis oleh kepala bidang/ ketua tim selama melakukan tugas pemeriksaan, kertas kerja harus mencerminkan langkah-langkah pemeriksaan yang ditempuh penguji. Segala aktivitas yang dilakukan, informasi yang diperoleh dan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan dalam pelaksanaan pemeriksaan kepala bidang/ ketua tim wajib membuat KKP.

Berdasarkan POP regular 2008, PKP yang dituangkan dalam KKP isi daftar temuan memuat hal-hal sebagai berikut:

- Kondisi
- Kriteria
- Penyebab terjadinya penyimpangan
- Akibat penyimpangan
- Komentar pejabat
- Rekomendasi

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau, dengan menitikberatkan pada efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan, maka tabel 4.4 menjadi tolak ukur pencapaian sasaran Inspektorat tahun 2013. Hal tersebut terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.4. Realisasi Pencapaian Sasaran Inspektorat Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP	WDP
	Jumlah SKPD yang diperiksa	61 obyek pemeriksaan	61 obyek pemeriksaan
	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	75%	100%
	Presentase kerugian daerah/negara yang dikembalikan	50%	24.13%
	Presentase tindak lanjut	70%	50.63%

	atas temuan BPK dan APIP yang sesuai rekomendasi		
Peningkatan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah	Presentase pegawai yang lulus kualifikasi pemeriksa	70%	23%
	Jumlah pelatihan internal	5	0
Terwujudnya sistem pengawasan yang memadai	Jumlah standar prosedur pengawasan yang dibuat	2	1
	Presentase cakupan SPIP	20%	0%

Sumber : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Kota Baubau 2013

Berdasarkan pengamatan penulis dari informasi yang dijelaskan oleh informan dan didukung dengan fakta yang ada di lapangan. Penulis dapat mengatakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh para pegawai Inspektorat Kota Baubau belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sebagian realisasi pencapaian sasaran Inspektorat yang belum terealisasi dengan baik di tahun 2013. (Pengamatan penulis dari hasil wawancara yang dilakukan dan juga data pendukung).

4.2.3 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan

Sebagai kegiatan terakhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada auditan atau yang perlu mengetahui informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan naskah hasil audit yang disusun selama melaksanakan audit agar informasi akurat dan objektif.

Seperti yang dibahasakan oleh Sekertaris Inspektorat, **Bapak La Sanu**, yang mengatakan bahwa :

“Setelah peleksanaan pengawasan selesai, kami selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh masing-masing tim yang telah dibentuk”.

(Wawancara tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)

Ketua tim wajib melakukan penyusunan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). LHP merupakan sasaran komunikasi resmi untuk menyampaikan seluruh informasi dari objek yang diperiksa tentang sesuatu realisasi kegiatan termaksud didalamnya menginformasikan temuan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatife dilengkapi dengan rekomendasi. **(Hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kota Baubau, Bapak Armin, tanggal 26 Februari 2013, 11.00 WITA).**

Persyaratan dari kriteria pelaporan hasil audit menjadi pedoman dasar bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah yang antara lain dibuat secara tertulis, dibuat segera, membuat ruang lingkup dan tujuan audit.

Hal diatas juga dibahasakan dalam wawancara dengan Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, **Bapak Mursidin**, yang mengatakan :

“Sesuai dengan Petunjuk Operasional Pemeriksaan (POP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus disampaikan dalam bentuk tertulis pada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai sarana komunikasi dari pelaksanaan pengawasan”.

(Tanggal 23 Februari 2013, pukul 16.30 WITA)

Jika dalam pelaksanaan pengawasan terdapat temuan-temuan yang bersifat mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan ataupun dapat mengakibatkan kerugian negara, maka temuan tersebut di cantumkan didalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

Seperti yang dijelaskan oleh Sekertaris Inspektorat, **Bapak La Sanu**, yakni :

“Temuan-temuan yang diperoleh dikarenakan adanya ketidak efesianan dan ketidakefektian anggaran yang dikeluarkan oleh para pejabat daerah saat dilakukan pemeriksaan dimasukkan didalam laporan hasil pemeriksaan ”

(Wawancara tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)

Penjelasan diatas juga ditambahkan oleh Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD, **Bapak Erman**, yang mengatakan bahwa “

“Pemborosan anggaran, pengeluaran yang tidak sepatutnya atau pendapatan penerimaan yang tidak sebenarnya serta ketidak taatan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi bukti temuan-temuan yang kami peroleh yang kemudian dicantumkan didalam laporan hasil pemeriksaan”.

(Wawancara tanggal 4 Maret 2013, pukul 10.00 WITA)

Dari hasil pemeriksaan, temuan yang didapatkan akan mengungkapkan penyebab yang membawa akibat yang tidak diinginkan. Berkaitan dengan temuan tersebut maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membuat rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab pengawas pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang baik.

Seperti yang dibahasakan oleh Inspektur Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya, **Ibu Sitti Nurbaya** yang menyatakan :

“Rekomendasi menyatakan tindakan yang harus diambil untuk menghilangkan faktor penyebab atau meminimaliskan akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dibuat oleh para pejabat yang diperiksa”.

(Wawancara tanggal 28 Februari 2013, pukul 14.00 WITA)

Setelah penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan telah selesai dibuat, laporan tersebut kemudian ditandatangani oleh ketua tim/penanggungjawab dari masing-masing tim yang telah dibentuk. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut lalu dipertanggung jawabkan kepada Walikota untuk ditindak lanjuti serta diserahkan pula tembusannya kepada instansi-instansi terkait. **(Hasil wawancara dengan Bapak La Sanu, selaku sekretaris inspektorat, tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)**

Seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Baubau No.3 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1 yang bunyinya “Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekertaris Daerah”. Maka Inspektorat Kota Baubau wajib melaporkan semua hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Hal ini dengan maksud agar segala aktifitas yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Baubau dapat terkontrol dengan baik. Disamping itu segala hal yang mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah dapat dicegah demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan baik.

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun, Inspektorat Kota Baubau menetapkan 3 sasaran

yang kemudian diturunkan menjadi 9 indikator. Seluruh 7 program dan 36 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 diarahkan guna mendukung pencapaian target kinerja yang diwakili oleh seluruh indikator tersebut. Indikator – indikator ini mewakili kegiatan utama yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Dari pencapaian kinerja pada tahun 2013, sasaran kualitas pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah dapat dicapai untuk 3 indikator dan 2 indikator masih belum mencapai target.

Sedangkan untuk sasaran profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah dan sistem pengawasan yang memadai hingga akhir tahun keseluruhan indikator kinerjanya tidak tercapai.

Tabel 4.5. Realisasi Pencapaian Sasaran Inspektorat Tahun 2013

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI terhadap LKPD	WDP	WDP	100
	Jumlah SKPD yang diperiksa	61 obyek pemeriksaan	61 obyek pemeriksaan	100
	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti	75%	100%	133
	Presentase kerugian daerah/negara yang dikembalikan	50%	24.13%	48.26
	Presentase tindak lanjut atas temuan BPK dan APIP yang sesuai rekomendasi	70%	50.63%	72.32

Peningkatan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah	Presentase pegawai yang lulus kualifikasi pemeriksa	70%	23%	32.85
	Jumlah pelatihan internal	5	0	0
Terwujudnya sistem pengawasan yang memadai	Jumlah standar prosedur pengawasan yang dibuat	2	1	50
	Presentase cakupan SPIP	20%	0%	0

Sumber : LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Inspektorat Kota Baubau 2013

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para informan, maka penulis menyimpulkan bahwa penyusunan laporan hasil pengawasan serta pertanggung jawaban hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Inspektorat Kota Baubau cukup efektif dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Baubau 2013. (Hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian di Kantor Inspektorat Kota Baubau).

4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

Didalam melakukan aktifitasnya sebagai pengawas fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Baubau tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau. Faktor-faktor tersebut yakni: faktor internal yaitu jumlah aparat pengawas, dan faktor eksternal yaitu

ketersediaan anggaran dan kelalaian objek pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.3.1. Faktor Internal

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk bisa mengefektifkan fungsi pengawasannya, tentu tidak terlepas dari banyaknya jumlah aparat pengawasnya.

Dalam hubungannya dengan uraian di atas maka dari hasil wawancara dengan **Bapak La Sanu**, selaku Sekertaris Inspektorat yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditunjang oleh jumlah aparatur dalam melakukan pengawasan”.

(Wawancara tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)

Kurangnya tenaga pemeriksa menjadi faktor yang paling berpengaruh didalam melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, **Bapak Hamsah**, yang mengatakan bahwa :

“Inspektorat Kota Baubau saat ini hanya memiliki 26 pegawai pada akhir tahun 2013, Inspektorat Kota Baubau memiliki 9 pejabat struktural dan 5 pejabat fungsional Auditor”

(Tanggal 22 Februari 2013, pukul 11.30 WITA)

Saat ini Inspektorat Kota Baubau belum memiliki pejabat fungsional yang cukup, sementara yang membantu melakukan pengawasan dilakukan pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional. **(Hasil wawancara dengan Bapak Mursidin selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, tanggal 23 Februari 2013, pukul 16.30 WITA)**

Pada tahun 2013, jumlah PNS di Inspektorat Kota Baubau terdiri dari 26 orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Baubau Tahun 2013

Gol./Ruang	L	P	Jumlah
IV	6	1	7
III	8	7	15
II	2	2	4
Jumlah	16	10	26

Sumber : *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Baubau tahun 2013*

4.3.2. Faktor Eksternal

Faktor lain yang menghambat fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau yakni adanya faktor eksternal yakni berupa ketersediaan anggaran yang diberikan serta adanya kelalaian yang dilakukan objek pemeriksaan.

Seperti yang diungkapkan oleh **Bapak La Sanu**, selaku Sekertaris Inspektorat Kota Baubau yakni :

“Selain faktor internal yang telah saya bahasakan tadi, faktor lainnya yaitu minimnya anggaran yang diberikan dalam melakukan pengawasan”.

(Wawancara tanggal 25 Februari 2013, pukul 13.30 WITA)

Hal serupa juga dikatakan oleh **Bapak Erman**, selaku Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD yang mengatakan bahwa :

“Saat ini kami selalu terkendala dengan minimnya anggaran yang tersedia sehingga objek pemeriksaan terpaksa dikurangi”.

(Wawancara tanggal 4 Maret 2013, pukul 10.00 WITA)

Didalam melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang dibutuhkan didalam melakukan pemeriksaan. Namun anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Kota Baubau tidak sesuai dengan jumlah SKPD yang akan diperiksa.

Hal ini sesuai yang dibahasakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi, **Bapak Munir Jaya**, yang mengatakan :

“Kami seringkali diberi anggaran yang tidak sesuai dengan banyaknya objek pemeriksaan sehingga kami harus mengurangi objek pemeriksaan dan kami agendakan pada tahun anggaran selanjutnya”.

(Wawancara tanggal 1 Maret 2013, pukul 10.45 WITA)

Selain ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain seringkali dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan oleh SKPD yang diperiksa. Selain itu pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang berada dilokasi saat aparat melakukan pemeriksaan. **(Hasil wawancara dengan Bapak Munir Jaya selaku**

**Inspektur Bidang Pembangunan dan Ekonomi, tanggal 1 Maret 2013,
pukul 10.45 WITA)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Inspektorat Kota Baubau maka kesimpulan yang dapat diambil bahwa penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah tidak terlaksana secara efektif dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. (Hasil pengamatan wawancara yang dilakukan penulis)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan

Oleh Inspektorat Kota Baubau

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi indikator dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau, maka pembahasan dalam penelitian ini ditekankan dalam menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Baubau. Dimana indikator penilaian yang digunakan dalam menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, penulis menetapkan beberapa indikator yang diambil dari pendapat yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto bahwa suatu pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, dan akurat.

Dalam melakukan penilaian efektivitas fungsi pengawasan, yang menjadi titik fokus dalam pembahasan adalah efektifitas perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan dan pertanggungjawaban pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya di Kota Baubau.

Kemudian dari hasil penilaian mengenai efektifitas dalam penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis

menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kemudian dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau belum efektif dengan mengamati hasil wawancara dan apa yang telah penulis utarakan dalam pembahasan pada bab IV dan melihat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu faktor yang menyebabkan yakni lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan dalam melakukan pemeriksaan. Selain itu dalam melakukan pemeriksaan seringkali para pejabat daerah yang ingin diperiksa tidak sedang berada di lokasi pemeriksaan.

Kemudian dilihat dari efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan sehingga menyebabkan lambatnya penyusunan laporan hasil pengawasan yang berdampak pula pada waktu pertanggungjawabannya.

5.1.2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Baubau

a. Faktor Internal

Sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Kota Baubau memiliki tugas mengawasi serta mengontrol jalannya pemerintahan agar supaya penyelenggaraan pemerintahan

dapat berjalan dengan baik. Namun saat ini jumlah aparatur pengawas yang terlibat langsung dalam melakukan pemeriksaan masih sangat kurang. Selain itu Inspektorat Kota Baubau hanya memiliki pejabat fungsional yang sangat minim, sehingga sementara waktu yang membantu melakukan pengawasan adalah pejabat struktural sehingga saat ini sebagian pejabat inspektorat terpaksa merangkap jabatan sebagai pengawas fungsional.

b. Faktor Eksternal

Didalam melakukan pemeriksaan tentu dibarengi dengan anggaran yang dibutuhkan didalam melakukan pemeriksaan. Namun anggaran yang diberikan kepada Inspektorat Kota Baubau tidak sesuai dengan jumlah SKPD yang akan diperiksa sehingga mengakibatkan objek pemeriksaan berkurang dari apa yang telah direncanakan.

Selain ketersediaan anggaran yang diberikan, faktor lain seringkali dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan itu terlambat diberikan oleh SKPD/instansi terkait yang diperiksa. Selain itu pejabat pemerintah yang diperiksa seringkali tidak sedang berada dilokasi saat aparat melakukan pemeriksaan.

5.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar Inspektorat Kota Baubau untuk secepatnya mengusulkan kepada Walikota Baubau untuk segera mengangkat pejabat baru untuk ditempatkan di jabatan fungsional sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan fungsional agar fungsi pengawasan penyelenggaraan pemeriksaan daerah di Kota Baubau dapat terselenggara dengan baik.

2. Disarankan pula, agar Pemerintah Daerah Kota Baubau memberikan anggaran sesuai yang dibutuhkan Inspektorat demi kelancaran program pengawasan yang dilakukan disetiap tahunnya. Disamping itu, perlunya sikap tegas dari Inspektorat Kota Baubau dalam melakukan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan dalam hal ini SKPD atau pihak-pihak yang terkait yang diperiksa, hal ini bertujuan untuk dapat menunjang kecepatan dalam memperoleh data dan selain itu penyajian data/ informasi yang akurat selama ini akan menunjang pelaporan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bintang Susmanto, 2009, *Pengawasan fungsional*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Balai Pustaka: Jakarta.

Fathoni Abdurrahmat, 2006, **Organisasi dan Manajemen**, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, **Dasar-dasar Manajemen**, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta

Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, **Pengantar Manajemen**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Prenada Media Jakarta

Sarwoto, 2010, **Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen**, cetakan keenambelas, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta

Siswandi dan Indra Iman, 2009, **Aplikasi Manajemen Perusahaan**, edisi kedua, Penerbit : Mitra Wicana Media, Jakarta

Siagian P. Sondang, 2008, **Pengantar Manajemen**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, **Dasar-dasar Manajemen**, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat**, Rineka Cipta, Yogyakarta.

_____. 1994. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Ghalia Indonesia : Jakarta.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara no.PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008

_____. 2008. Petunjuk Operasional Pemeriksaan Reguler. Inspektorat. Kota Baubau.

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau

Peraturan Walikota Baubau Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Baubau

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

